EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah melalui Kompetensi SDM, Manajemen Risiko, SPIP, Teknologi Informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Muslicha Putri Rachmawati[1] , Jaeni[2]
[1,2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang
E-mail: muslichaputri7005@mhs.unisbank.ac.id, jaeni@edu.unisbank.ac.id

Article History:
Received: 16 Juli 2026
Revised: 23 Agustus 2026
Accepted: 09 September 2026

Keywords: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; kompetensi sumber daya manusia; manajemen risiko; SPIP; teknologi informasi; standar akuntansi pemerintahan.

Abstract: *Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan penentu penting dalam mencapai tata kelola yang transparan dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak kompetensi sumber daya manusia, manajemen risiko, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penerapan teknologi informasi, dan penegakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di Organisasi Aparat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif melalui survei terhadap 100 entitas yang bergerak di bidang jasa manajemen keuangan dan aset. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda memakai IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian memperlihatkan kompetensi sumber daya manusia, efektivitas SPIP, dan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi tidak menunjukkan dampak yang substansial. Skor Adjusted R Square 0,779 memperlihatkan model tersebut menjelaskan 77,9% varians dalam kualitas laporan keuangan, dengan sisanya disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak termasuk dalam model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kemampuan perangkat, peningkatan pengendalian internal, dan penerapan SAP yang konsisten merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kriteria penting untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan keuangan relevan, bisa diandalkan, bisa dibandingkan, dan mudah dipahami berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan memberikan landasan bagi penilaian kinerja, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan (Arifin dkk., 2022; Dewi dkk., 2019). Inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sangat penting untuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten meraih Opini Tanpa Kualifikasi (WTP) atas laporan keuangannya. Pencapaian memperlihatkan pembuatan laporan keuangan sesuai norma dan peraturan yang relevan. Namun demikian, memperoleh penilaian WTP tidak serta merta menandakan pelaksanaan terbaik dari semua aspek pengelolaan keuangan daerah. Banyak masalah yang masih ada, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM), efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, tingkat integrasi teknologi informasi, dan kapasitas organisasi untuk mengelola data dan informasi keuangan. Variabel-variabel yang disebutkan di atas dapat memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan, meskipun opini audit tetap utuh (Robles dkk., 2026). Akibatnya, peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan tata kelola yang berkelanjutan dan sistematis.

Banyak penelitian telah memperlihatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa elemen yang saling terkait. Pengaruh penting adalah kompetensi SDM, karena pejabat dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman memadai lebih mahir menerapkan aturan akuntansi pemerintah secara efektif, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih andal (Dewi dkk., 2019; Naik dkk., 2026). Pelaksanaan manajemen risiko sangat penting untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengurangi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam manajemen keuangan daerah (Yudiyanto & Ningsih, 2023; Muni dkk., 2025).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi kompetensi karyawan, manajemen risiko, efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang konsisten. SPIP meningkatkan sistem pengendalian, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, meminimalkan kemungkinan kesalahan, dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih dapat diandalkan (Wuriasih dkk., 2019; Biyantoro, 2023). Secara bersamaan, integrasi teknologi informasi dengan proses bisnis organisasi dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data dan mempercepat pembuatan laporan keuangan (Suhardi, 2025). Selain itu, SAP berfungsi sebagai tolok ukur dalam proses pengakuan, pengukuran, pendokumentasian, penyajian, dan pengungkapan transaksi, sehingga memastikan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai kualitas yang diamanatkan oleh SAP (Darwin dkk., 2024).

Korelasi antara kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, dan instalasi SAP terkait kualitas laporan keuangan telah diteliti secara menyeluruh, meskipun temuannya saling bertentangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa semua variabel secara substansial memengaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa hanya sejumlah variabel terbatas yang memberikan pengaruh besar (Manurung dkk., 2025). Selain itu, hanya sedikit penelitian yang secara bersamaan menyelidiki kelima karakteristik ini di pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Yudiyanto & Ningsih, 2023). Perbedaan temuan penelitian ini menandakan adanya kesenjangan penelitian yang memerlukan penyelidikan empiris tambahan.

Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan SAP

terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan studi ini bertujuan untuk memajukan akuntansi sektor publik secara empiris dan memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif meningkatkan manajemen keuangan dan kualitas pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai metodologi kuantitatif melalui survei untuk menyelidiki dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Aparatur Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Maret hingga Juli 2026.

Partisipan terdiri dari pejabat yang langsung terlibat pada proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pejabat Administrasi Keuangan (PPK-SKPD), bendahara pengeluaran, bendahara pendapatan, bendahara gaji, pengelola aset, dan personel lain yang bertugas menyiapkan laporan keuangan. Responden dipilih melalui metode purposive sampling, dengan ketentuan bahwa mereka harus memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, 100 orang dianggap memenuhi syarat untuk sampel penelitian.

Penelitian memakai 2 kategori data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner pada seluruh partisipan, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai entitas resmi, termasuk publikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen penelitian dirumuskan dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan setiap variabel penelitian: kompetensi sumber daya manusia (X_1), manajemen risiko (X_2), SPIP (X_3), pemanfaatan teknologi informasi (X_4), implementasi SAP (X_5), dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Semua indikator dievaluasi memakai skala Likert 5 poin, skor 1 sangat tidak setuju dan skor 5 sangat setujua. Sebelum analisis, instrumen penelitian menjalani validasi melalui uji validitas memakai korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas memakai koefisien Alpha Cronbach untuk memastikan setiap indikator secara akurat dan konsisten mengukur konstruk penelitian.

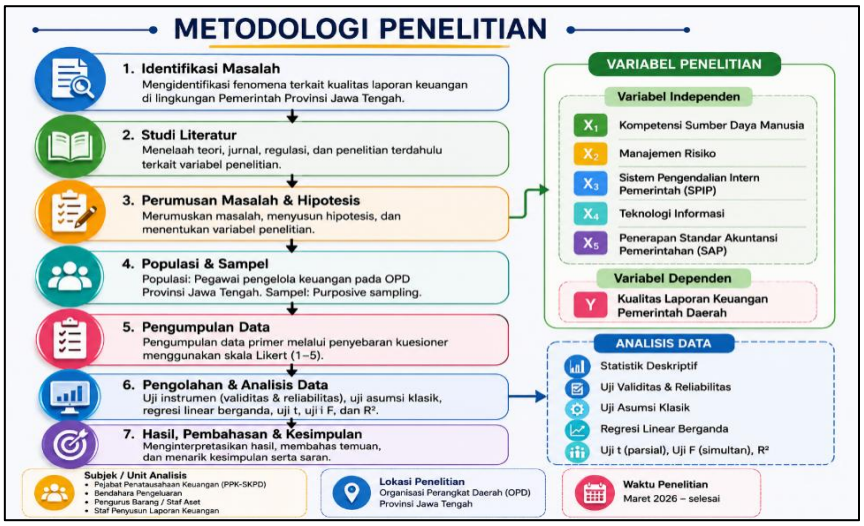
Pengolahan data dilakukan melalui perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Prosedur analitis dimulai dengan penyajian statistik deskriptif untuk menggambarkan atribut data penelitian, diikuti dengan pemeriksaan asumsi klasik, yakni normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sesudah memenuhi semua prasyarat analitis, pengaruh variabel independen pada variabel dependen diperiksa dengan regresi linier berganda memakai model persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α = Konstanta
β_1–β_5 = Koefisien regresi
X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
X_2 = Manajemen Risiko
X_3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
X_4 = Teknologi Informasi
X_5 = Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
ε = Galat (error)

Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk menilai pengaruh individual setiap variabel independen, uji F untuk mengevaluasi pengaruh kolektif semua variabel independen pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan koefisien determinasi (Adjusted R^2) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Pelaksanaan penelitian dimulai proses identifikasi permasalahan sebagai dasar penyusunan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur untuk memperkuat landasan teoretis. Tahapan selanjutnya meliputi merumuskan masalah dan hipotesis, mengidentifikasi populasi dan sampel, menyusun instrumen, memperoleh data melalui kuesioner, memproses dan menganalisis data, mendiskusikan temuan penelitian, serta mensintesis kesimpulan dan saran. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian tersebut disajikan secara sistematis pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Penelitian ini mencakup 100 personel dari OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terlibat pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Karakteristik responden diuraikan berdasarkan posisi, masa kerja, tingkat pendidikan, dan latar belakang akademis, seperti yang diilustrasikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jabatan	Bendahara	31	31
	Pengurus Barang/Staf Aset	56	56
	PPK-SKPD/Penyusun Laporan Keuangan	13	13
Masa Kerja	< 1 tahun	17	17
	1–3 tahun	28	28
	4–6 tahun	32	32
	> 6 tahun	23	23
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	7	7
	Diploma (D3)	26	26

	Sarjana (S1)	60	60
	Magister (S2)	7	7
Latar Belakang Pendidikan	Administrasi Publik/Negara	6	6
	Akuntansi/Keuangan	26	26
	Manajemen	15	15
	Lainnya	53	53

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh Pengurus Barang/Staf Aset (56%), diikuti Bendahara (31%) dan PPK-SKPD/Penyusun Laporan Keuangan (13%). Sebagian besar responden memiliki masa kerja 4–6 tahun (32%), berpendidikan Sarjana (60%), serta berasal dari bidang Akuntansi/Keuangan (26%), meskipun terdapat responden dengan latar belakang disiplin ilmu lain. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu memberikan informasi yang selaras dengan tujuan penelitian.

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis statistik deskriptif memberi gambaran rinci mengenai fitur data penelitian sebelum analisis selanjutnya. Data yang diberikan mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku variabel penelitian. Tabel 2 menyajikan ringkasan hasil dari analisis statistik deskriptif.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Total	100	16.00	45.00	36.8300	5.29542
X2_Total	100	15.00	40.00	34.7800	5.27541
X3_Total	100	15.00	50.00	44.7700	6.31473
X4_Total	100	12.00	35.00	28.0900	5.28213
X5_Total	100	13.00	35.00	29.7900	4.46376
Y_Total	100	15.00	50.00	44.9800	6.03187
Valid N (listwise)	100				

Pada Tabel 2, semua variabel penelitian mempunyai nilai mean relatif tinggi. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) memiliki nilai rata-rata 36,83 simpangan baku 5,30, sedangkan Manajemen Risiko (X_2) memperoleh nilai rata-rata 34,78 dengan simpangan baku 5,28. Variabel SPIP (X_3) memiliki nilai rata-rata 44,77 dengan simpangan baku 6,31, sementara Teknologi Informasi (X_4) menunjukkan nilai rata-rata 28,09 dengan simpangan baku 5,28. Variabel "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah" (X_5) menghasilkan rata-rata 29,79 dengan standar deviasi 4,46, sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) mencatat rata-rata 44,98 dengan standar deviasi 6,03.

Nilai rata-rata relatif tinggi memperlihatkan responden memberi evaluasi baik pada semua variabel yang diteliti. Nilai standar deviasi untuk setiap variabel lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan distribusi data cukup seragam dan terdapat fluktuasi minimal dalam jawaban responden. Hal ini menandakan data mempunyai tingkat konsistensi memadai dan bisa berfungsi sebagai dasar analisis statistik selanjutnya (Ghozali, 2021).

Temuan analisis statistik deskriptif menawarkan gambaran awal tentang fitur data penelitian dan menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda selanjutnya.

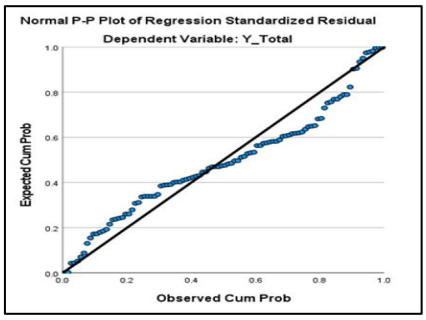
UJI KUALITAS DATA DAN UJI ASUMSI KLASIK

Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian dan model regresi dievaluasi melalui penilaian kualitas data dan pengujian asumsi klasik. Pengujian dirancang untuk memverifikasi bahwa instrumen penelitian secara efektif menilai variabel dan model regresi memenuhi kriteria statistik, sehingga memberikan hasil analitis bisa diandalkan (Ghozali, 2021).

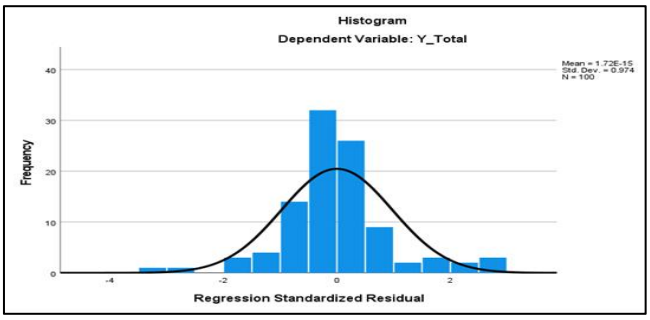
Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Instrumen dan Asumsi Klasik

Variabel	Jumlah Item	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha	Tolerance	VIF	Keterangan
X_1	9	0,452–0,776	0,874	0,508	1,968	Valid, Reliabel, Tidak terjadi Multikolinearitas
X_2	8	0,802–0,897	0,966	0,157	6,367	Valid, Reliabel, Tidak terjadi Multikolinearitas
X_3	10	0,789–0,901	0,965	0,164	6,098	Valid, Reliabel, Tidak terjadi Multikolinearitas
X_4	7	0,461–0,859	0,911	0,520	1,922	Valid, Reliabel, Tidak terjadi Multikolinearitas
X_5	7	0,730–0,892	0,941	0,261	3,838	Valid, Reliabel, Tidak terjadi Multikolinearitas
Y	10	0,732–0,875	0,955	–	–	Valid dan Reliabel

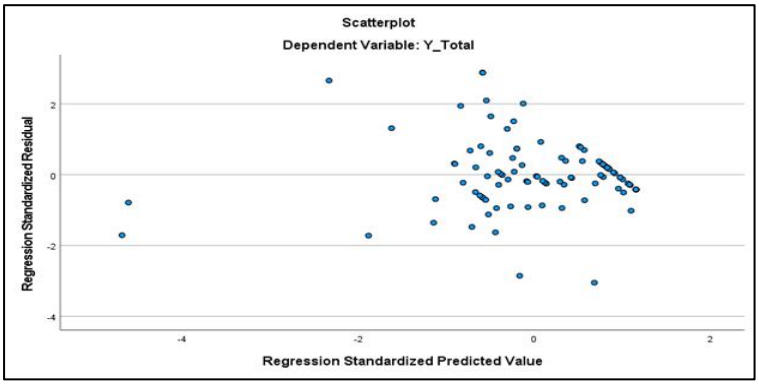
Menurut Tabel 3, semua indikator penelitian memiliki nilai Korelasi Item-Total yang Dikoreksi yang memenuhi standar validitas, sehingga setiap item pernyataan dianggap mampu mengekspresikan konstruk yang diukur. Instrumen efektif menunjukkan indikator penelitian dapat secara akurat mengukur variabel sesuai konsep yang didefinisikan (Johari dkk., 2018; Ghozali, 2021). Semua variabel menghasilkan nilai Alpha Cronbach yang melebihi 0,70, memperlihatkan instrumen tersebut memiliki tingkat konsistensi internal yang terpuji. Skor ini menunjukkan instrumen bisa menghasilkan data stabil dan bisa diandalkan ketika digunakan pada situasi penelitian yang sebanding (Peer & Gamliel, 2011; Ghozali, 2021). Uji multikolinearitas memperlihatkan variabel independen mempunyai nilai Toleransi > 0,10 dan VIF < 10. Hasil tersebut memperlihatkan tidak adanya hubungan linier yang signifikan di antara variabel independen, mengindikasikan model regresi tidak mempunyai gejala multikolinearitas (Adeboye dkk., 2014; Kim, 2019; Ghozali, 2021). Uji memperlihatkan instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sementara model regresi memenuhi salah satu asumsi mendasar yang diperlukan sebelum pengujian hipotesis.



Gambar 1. Histogram Regression Standardized Residual



Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Uji normalitas memperlihatkan histogram residual memiliki pola distribusi yang mendekati normalitas, dan titik-titik pada Plot P-P Normal sejajar dengan garis diagonal. Pola ini menandakan residual model regresi menunjukkan distribusi normal, sehingga memenuhi asumsi normalitas (Van Horn dkk., 2012; Barker & Shaw, 2015; Ghozali, 2021).

Uji heteroskedastisitas memperlihatkan titik-titik residual terdistribusi acak di sepanjang sumbu horizontal, tidak menunjukkan pola jelas. Persyaratan ini menandakan varians residual tetap konstan, memperlihatkan model regresi bebas dari heteroskedastisitas (Midi dkk., 2010; Ghozali, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.889[a]	.791	.779	2.83316	1.939

Pada Tabel 4 Nilai Durbin–Watson 1,939. Nilai berkisar dari 1,5 sampai 2,5, memperlihatkan residual model regresi bersifat independen dan bebas dari autokorelasi (Aprianto & Debataraja, 2020; Ghozali, 2021).

Uji komprehensif memperlihatkan instrumen penelitian memenuhi standar validitas dan reliabilitas, sedangkan model regresi sesuai dengan asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dengan memenuhi semua kriteria ini, model regresi dianggap tepat untuk menguji dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, dan penerapan SAP pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

ANALISIS REGRESI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Analisis regresi linier berganda untuk menyelidiki dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, dan penerapan SAP pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keputusan
Konstanta	4,393	2,286	–	1,921	0,058	–
X_1	0,161	0,075	0,141	2,129	0,036	H_1 diterima (berpengaruh positif signifikan)
X_2	-0,180	0,136	-0,158	-1,323	0,189	H_2 ditolak (tidak berpengaruh)
X_3	0,589	0,111	0,616	5,287	0,000	H_3 diterima (berpengaruh positif signifikan)
X_4	0,098	0,075	0,086	1,317	0,191	H_4 ditolak (tidak berpengaruh)
X_5	0,397	0,125	0,294	3,174	0,002	H_5 diterima (berpengaruh positif signifikan)

Pada Tabel 5, didapat persamaan regresi:

$$Y = 4{,}393 + 1{,}362X_1 - 0{,}180X_2 + 0{,}589X_3 + 0{,}098X_4 + 0{,}397X_5 + e$$

Persamaan tersebut memperlihatkan kompetensi SDM, SPIP, teknologi informasi, dan penerapan SAP mempunyai koefisien regresi positif, namun manajemen risiko menunjukkan koefisien regresi negatif. Nilai koefisien menunjukkan sifat hubungan antara setiap variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji pendahuluan memperlihatkan kompetensi SDM, SPIP, dan instalasi SAP memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga memberi dampak menguntungkan dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, manajemen risiko dan teknologi informasi mempunyai nilai sig. > 0,05, memperlihatkan tidak ada dampak substansial pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akibatnya, Hipotesis 1, 3, dan 5 dikonfirmasi, sedangkan Hipotesis 2 dan 4 ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Indikator	Nilai	Keterangan
R^2	0,791	Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 79,1%
Adjusted R^2	0,779	Kemampuan model setelah disesuaikan sebesar 77,9%
F hitung	70,949	Nilai statistik uji F
Sig. F	0,000	Model regresi signifikan/layak digunakan (Sig. < 0,05)

Pada Tabel 6, didapat nilai R Square 0,791 dan Adjusted R Square 0,779. Memperlihatkan kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, dan implementasi SAP bersama-sama mampu menjelaskan 77,9% variasi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 22,1% dipengaruhi faktor di luar model penelitian. Nilai F hitung 70,949, dengan tingkat signifikansi 0,000, memperlihatkan semua faktor independen secara kolektif memberikan pengaruh cukup besar pada kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Model regresi yang dipakai secara efektif menjelaskan hubungan antar variabel dan sesuai untuk pengujian hipotesis.

PEMBAHASAN PENGARUH KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan kompetensi SDM berdampak positif dan signifikan pada kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Data menunjukkan bahwa peningkatan keahlian di antara personel pemerintah berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Pejabat pemerintah dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman memadai umumnya mampu menerapkan peraturan akuntansi pemerintah secara efektif, melaksanakan manajemen keuangan yang efisien, dan mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan dan penyajian data keuangan. Hal ini menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih dapat diandalkan dan tepat yang sesuai dengan SAP. Temuan ini sesuai Teori Tata Kelola, menyatakan pejabat pemerintah berfungsi sebagai manajer yang memprioritaskan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks ini, otoritas yang cakap akan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme, menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi sebagai sarana akuntabilitas publik.

Dewi dkk. (2019), memperlihatkan kompetensi SDM berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nahak dkk. (2026), Suhardi (2025), dan Djumyati dkk. (2025) juga menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi pejabat sipil mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di sektor publik. Konsistensi temuan di seluruh penelitian ini menggarisbawahi gagasan bahwa kompetensi SDM adalah penentu penting manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan penyediaan informasi keuangan yang bertanggung jawab.

Penelitian ini menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui berbagai inisiatif pengembangan kapasitas, termasuk pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, sertifikasi profesional, dan peningkatan kompetensi dalam akuntansi pemerintah. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil untuk secara mahir mengelola dan menghasilkan laporan keuangan, secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dokumentasi keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN PENGARUH MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan manajemen risiko tidak secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Temuan memperlihatkan integrasi manajemen risiko dalam Organisasi Aparatur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum secara substansial memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen risiko belum terintegrasi secara efektif dengan proses manajemen keuangan, sehingga manfaat penerapannya tidak terlihat pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ditinjau dari Stewardship Theory, pengelolaan risiko merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan melindungi kepentingan publik. Namun, penelitian memperlihatkan penerapan manajemen risiko pada objek penelitian masih belum mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal, yang mengindikasikan bahwa implementasinya kemungkinan masih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan belum menjadi bagian yang menyatu dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Tidak signifikannya pengaruh manajemen risiko diduga dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti tingkat kematangan implementasi yang belum seragam pada setiap OPD, proses

identifikasi serta mitigasi risiko yang belum berjalan secara optimal, dan pemahaman aparatur mengenai manajemen risiko yang masih bervariasi. Selain itu, pada sebagian organisasi sektor publik, penerapan manajemen risiko masih lebih diarahkan untuk memenuhi kewajiban administratif dibandingkan sebagai instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan pada pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, manfaat manajemen risiko terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan belum dapat dirasakan secara maksimal.

Manurung et al. (2025), menjelaskan keberhasilan penerapan manajemen risiko sangat ditentukan oleh tingkat kematangan implementasi, komitmen pimpinan, dan budaya organisasi. Widyastuti (2020), menyatakan implementasi Enterprise Risk Management tidak selalu berdampak langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan apabila belum diterapkan secara menyeluruh dalam proses bisnis organisasi. Yudiyanto dan Ningsih (2023), membuktikan penerapan manajemen risiko mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Perbedaan hasil diduga dipengaruhi variasi karakteristik organisasi, tingkat penerapan manajemen risiko, serta kesiapan sumber daya manusia pada masing-masing objek penelitian.

Dari penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan praktik manajemen risiko dengan menambah kompetensi staf, menyempurnakan proses identifikasi dan mitigasi risiko, serta mengintegrasikan manajemen risiko di seluruh fase pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko memenuhi persyaratan administratif sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Investigasi menunjukkan SPIP secara positif dan signifikan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang lebih sukses berkorelasi dengan kualitas yang lebih unggul dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Pengendalian internal yang efektif menjamin bahwa semua fase manajemen keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan keuangan, dilakukan sesuai dengan peraturan yang relevan. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan perbedaan pada manajemen keuangan, menghasilkan informasi keuangan lebih bisa diandalkan.

SPIP berfungsi tidak hanya instrumen pemantauan, juga dasar untuk mencapai tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Membangun sistem pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, memperkuat kepercayaan data keuangan, dan mendorong pemanfaatan sumber daya organisasi yang efisien. Akibatnya, implementasi SPIP memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang mewujudkan atribut relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman. Temuan ini sesuai Teori Tata Kelola, yang memandang pejabat pemerintah sebagai pengelola aset dan sumber daya organisasi yang bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, SPIP menjadi mekanisme yang mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas secara akuntabel sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan.

Wuriasih et al. (2019) menyatakan efektivitas SPIP berdampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh Asyafiah dan Simanjuntak (2023), menjelaskan penguatan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui optimalisasi fungsi pengawasan. Selain itu, penelitian Biyantoro (2023) serta Maulina dan Fatmi (2018) menunjukkan bahwa pengendalian intern yang

diterapkan secara efektif dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal. Kesamaan temuan di berbagai studi semakin memperkuat bahwa SPIP merupakan elemen fundamental dalam mencapai tata kelola keuangan sektor publik yang efektif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus mengoptimalkan implementasi SPIP melalui penguatan fungsi pengawasan, peningkatan efektivitas pengendalian terhadap aktivitas operasional, serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern pada setiap OPD. Upaya ini diharap meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.

PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan pemanfaatan teknologi informasi tidak secara substansial memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah daerah. Studi ini memperlihatkan keberadaan teknologi informasi saja tidak dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tanpa dukungan kesiapan organisasi dan kemampuan pejabat untuk menjalankan dan memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi saja tidak cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang unggul tanpa penguatan elemen pendukung tambahan.

Tidak signifikannya pengaruh teknologi informasi diduga dipengaruhi oleh beberapa kendala yang masih dihadapi organisasi sektor publik. Berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya integrasi antaraplikasi, perbedaan tingkat pemanfaatan sistem informasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan kompetensi pengguna, serta belum seragamnya prosedur operasional dalam pengelolaan data keuangan, menyebabkan teknologi informasi lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana administrasi daripada sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan. Berdasarkan perspektif Stewardship Theory, teknologi informasi seharusnya menjadi alat yang membantu aparatur menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan secara lebih efektif. Penelitian ini memperlihatkan manfaat belum dapat diwujudkan secara optimal karena masih diperlukan dukungan kompetensi aparatur, integrasi sistem, dan tata kelola organisasi yang memadai.

Wahtan et al. (2025), menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan apabila tidak diimbangi kualitas SDM dan sistem pengendalian intern memadai. Biyantoro (2023), menjelaskan efektivitas teknologi informasi bergantung pada penerapan SAP serta pengendalian intern yang baik. Selain itu, Robles et al. (2026) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi, integrasi data, koordinasi antarsatuan kerja, dan kesiapan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi informasi belum dapat menjadi faktor yang secara mandiri menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengoptimalkan integrasi sistem informasi keuangan, meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan berbagai aplikasi keuangan, serta memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan sistem pengendalian intern yang efektif. Langkah ini diharap meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan teknologi informasi.

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan penerapan SAP secara positif dan signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah. Temuan memperlihatkan implementasi SAP yang konsisten meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan, karena seluruh proses akuntansi yakni pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah dilakukan sesuai prinsip dan standar yang seragam. Mendorong terciptanya laporan keuangan lebih unggul, lebih akurat, dan sesuai peraturan relevan.

Penerapan SAP menyediakan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan sehingga informasinya mempunyai tingkat relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman yang lebih baik. Selain menciptakan keseragaman praktik akuntansi di setiap Organisasi Perangkat Daerah, implementasi SAP juga mempermudah proses evaluasi laporan keuangan serta meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan para pengguna informasi. Temuan tersebut selaras dengan Stewardship Theory, yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah akan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, SAP sebagai tolok ukur yang membantu aparatur dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan menyampaikan informasi keuangan berkualitas tinggi kepada para pemangku kepentingan.

Darwin et al. (2024), menyatakan implementasi SAP berdampak positif pada kualitas laporan keuangan sektor publik. Putri (2024) menyimpulkan instalasi SAP sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama jika didukung oleh mekanisme pengendalian internal yang efisien. Selain itu, studi Ariada dan Darmawan (2023) dan Maulina dan Fatmi (2018) menunjukkan penerapan SAP yang konsisten meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah. Kesesuaian temuan penelitian ini semakin memperkuat bahwa SAP sebagai landasan utama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah sesuai norma akuntansi sektor publik.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus menjaga konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui peningkatan pemahaman aparatur terhadap perkembangan regulasi, penyelenggaraan pelatihan akuntansi pemerintahan secara berkelanjutan, serta penguatan mekanisme evaluasi atas penerapan standar akuntansi di setiap OPD. Upaya ini diharap bisa mempertahankan dan berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas manajemen keuangan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, dan implementasi SAP pada kualitas laporan keuangan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Analisis memperlihatkan kompetensi SDM, efektivitas SPIP, dan penerapan SAP berdampak positif dan signifikan pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh yang substansial. Meskipun demikian, secara simultan kelima variabel penelitian mampu menjelaskan sebagian besar variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan mengindikasikan upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan memerlukan dukungan aparatur yang kompeten, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif, serta penerapan SAP secara konsisten. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus memperkuat kapasitas SDM, mengoptimalkan implementasi SPIP, dan mempertahankan

konsistensi penerapan SAP guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel.

Studi ini menawarkan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik, khususnya tentang faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Studi ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di dalam OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berfokus pada lima variabel independen. Disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas parameter penelitian dan memasukkan variabel tambahan yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menghasilkan hasil yang lebih menyeluruh dan perspektif yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

Adeboye, N. O., Fagoyinbo, I. S., & Olatayo, T. O. (2014). Estimation of the effect of multicollinearity on the standard error for regression coefficients. IOSR Journal of Mathematics, 10(4), 16–20. https://doi.org/10.9790/5728-10411620

Aprianto, A., & Debataraja, N. N. (2020). Metode Cochrane–Orcutt untuk mengatasi autokorelasi pada estimasi parameter ordinary least squares. BIMASTER: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya, 9(1), 95–102. https://doi.org/10.26418/bbimst.v9i1.38590

Ariada, M., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Profesi, 14(2), 226–237. https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.61413

Arifin, J., Mohd-Sanusi, Z., & Hidayah, E. (2022). Determinants of the quality of local government financial statements in Indonesia: Coercive pressure dominates. Humanities and Social Sciences Letters, 10(3), 336–355. https://doi.org/10.18488/73.v10i3.3074

Asyafiah, P., & Simanjuntak, B. H. (2023). The moderating role of the government internal control system on factors influencing the quality. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 181–198. https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.356

Barker, L. E., & Shaw, K. M. (2015). Best (but oft-forgotten) practices: Checking assumptions concerning regression residuals. The American Journal of Clinical Nutrition, 102(3), 533–539. https://doi.org/10.3945/ajcn.115.113498

Biyantoro, A. (2023). Local government financial reports: Utilisation of information technology and implementation of government accounting standards. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 15(2), 241–251. https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.7616

Darwin, K., Haliah, H., Nirwana, N., Syamsuddin, S., & Kusumawati, A. (2024). The implementation of governmental accounting standards and the quality of financial statements. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 13(1), 256–261. https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.11297

Dewi, N. F., Azam, S. M. F., Khalidah, S., & Yusoff, M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statements and financial accountability. Management Science Letters, 9, 1373–1384. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.

Djumyati, L., Ramdany, R., & Susilawati, S. (2025). Pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Journal of Economics and Business UBS, 14, 451–463. https://doi.org/10.52644/joeb.v14i3.2689

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Johari, R. J., Alam, M., & Said, J. (2018). Assessment of management commitment in Malaysian public sector. Cogent Business & Management, 5. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469955

Kim, J. H. (2019). Multicollinearity and misleading statistical results. Korean Journal of Anesthesiology, 72(6), 558–569. https://doi.org/10.4097/kja.19087

Manurung, G., Machdar, N. M., Manurung, A. H., & Sangapan, L. H. (2025). Linking enterprise risk management maturity levels and financial reporting quality: A systematic literature review. Current Science Research Bulletin, 2(11), 339–349. https://doi.org/10.55677/csrb/02-V02I11Y2025

Maulina, R., & Fatmi, L. (2018). Dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Media Riset Akuntansi dan Bisnis, 2(1), 48–60. https://doi.org/10.35308/akbis.v2i1.541

Midi, H., Sarkar, S. K., & Rana, S. (2010). Collinearity diagnostics of binary logistic regression model. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 13(3), 253–267. https://doi.org/10.1080/09720502.2010.10700699

Nahak, M. J. Y., Mura, F. N., & Baso, S. P. S. (2026). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 9(1), 223–229. https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1393

Peer, E., & Gamliel, E. (2011). Too reliable to be true? Response bias as a potential source of inflation in paper-and-pencil questionnaire reliability. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 16(9). https://doi.org/10.7275/e482-n724

Putri, A. N. (2024). Impact of human resource competence, IT utilization, and government accounting standards on financial statement quality: The moderating role of internal control systems.

Robles, D. S. P., Torero, Y. Y. L., Cayetano, F. P. M., & Ramírez, M. A. R. (2026). Challenges in the implementation of the integrated financial management system: An approach based on governance and institutional capacity in local governments. International Journal of Accounting and Economics Studies, 12(1), 673–681. https://doi.org/10.14419/3t44n207

Suhardi. (2025). The effect of information technology, HR competence, internal control, and organizational culture on the quality of financial reports. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(2), 317–326. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3262

Van Horn, M. L., Smith, J., Fagan, A. A., Jaki, T., Feaster, D. J., Masyn, K., Hawkins, J. D., & Howe, G. (2012). Not quite normal: Consequences of violating the assumption of normality in regression mixture models. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 19(2), 227–249.

Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, S. (2025). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Advances in Management & Financial Reporting, 3(3), 363–381.

Widyastuti, A. (2020). Enterprise risk management (ERM) dan kualitas laporan keuangan BUMN di Indonesia. Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(1), 41–54. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6182

Wuriasih, A., Wahyuni, E., & Syarifuddin. (2019). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies, 2, 48–57. https://doi.org/10.36883/jfres.v2i1.25

Yudiyanto, Y., & Ningsih, S. (2023). The role of risk management implementation in increasing accountability: A study of all regency/municipality governments. Jurnal Borneo Administrator, 19(2), 131–144. https://doi.org/10.24258/jba.v19i2.1143